

Pendidikan Kewarganegaraan Dan Lingkungan Hidup

M. Syahri¹

Abstrak

Environmental issues are moral issues, issues of human behavior. Environment is not a technical problem. Likewise, the global ecological crisis we are experiencing today is a moral issue, a moral crisis globally. Therefore, it is necessary to deal with ethics and morality. Could not be denied that a variety of environmental cases that occurred today. Both global and national in scope, the bulk comes from human behavior, by Arne Næss (in Sony Keraf, 2006), today's environmental crisis can only be addressed by making changes in outlook and behavior of humans toward nature is fundamentally and radically.

Keywords : environmental, global ecological, moral dan human behavior issues.

Isu-isu lingkungan merupakan isu-isu moral, isu-isu dari perilaku manusia. Lingkungan bukanlah masalah teknis. Demikian juga, krisis ekologis global yang kita alami hari ini merupakan isu moral, satu krisis moral menyeluruh. Oleh sebab itu, perlu ada kesepakatan antara etika dan moralitas. Tidak dapat disangkal berbagai kasus lingkungan terjadi hari ini. Keduanya baik lapangan global maupun nasional, merupakan kumpulan yang terjadi dari perilaku manusia, oleh Arne Naess (dalam Sony Jeraf, 2006), krisis lingkungan hari ini hanya dapat menjadi penambah perubahan yang dibuat dalam pandangan dan perilaku manusia kearah sifat yang alami dasar dan secara radikal.

PENDAHULUAN

1. Pemanasan Global (Global Warming) Merupakan Issue Sentral

Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali (*kejalan yang benar*) (Q.S. ar-Ruum, 30:41). Makna ayat di atas menggambarkan betapa eratnya keterkaitan antara sikap manusia dan lestari tidaknya lingkungan tempat manusia itu tinggal. Keseimbangan ekosistem yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan kehidupan yang harmoni dalam segala aspek, baik "*sosial, ekonomi, maupun budaya*". Pembangunan yang "*integralistik dan holistic*" adalah langkah ideal dalam menciptakan "*keharmonisan dan keseimbangan ekosistem*" di alam. Kenyataannya, pembangunan lebih diarahkan atau dititik beratkan pada aspek

ekonomi an-sich dan mengabaikan nilai-nilai humanis. Pandangan manusia terhadap alam lingkungan (*ekosistem*) dapat dibedakan atas dua golongan yakni pandangan imanen (*holistic*) dan transeden. Menurut pandangan *holistic*, manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya, seperti dengan hewan, tumbuhan, sungai dan gunung, namun merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Menurut pandangan transenden, kehidupan secara ekologi merupakan bagian dari lingkungannya, manusia merasa terpisah dari lingkungannya, lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya (Iskandar, 2001)

Pemanasan global (*global warming*) beberapa tahun terakhir ini menjadi isu sentral, hal ini menjadi pembicaraan masyarakat dunia,

¹M. Syahri., Dosen Jurusan PKn FKIP Unmuh malang. HP. 08123389273, e-mail: Syahri_ roesman@yahoo.com

termasuk di Indonesia. Di Indonesia tanda-tanda terjadinya perubahan iklim tampak jelas, mulai dari pergeseran musim kemarau dan musim penghujan, terjadinya ombak yang tinggi, meluasnya kekeringan, terjadinya banjir dimana-mana dan angin puting beliung, kerusakan lingkungan tidak terelakan. Gunung gundul, hutan meranggas, tanah gersang ada dimana-mana, sungai debit airnya berkurang, sumber mata air banyak yang mati individu-individu yang ada tak ambil peduli, masing-masing berpacu mencari rizki untuk hidupnya sendiri-sendiri. Melihat kondisi yang sudah amat mengawatirkan tersebut retorika perlu dikurangi, misalnya seminar-seminar nasional, regional maupun internasional yang diselenggarakan di hotel-hotel berbintang yang membicarakan kerusakan lingkungan, pidato-pidato pejabat tentang lingkungan, study banding-study banding yang dilakukan pejabat tentang lingkungan lebih baik dan untuk penyadaran dan penguatan masyarakat tentang lingkungan.

2. Masalah Lingkungan Hidup Adalah Masalah Moral Bukan Masalah Teknis Saja

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah moral, persoalan perilaku manusia. Lingkungan hidup bukan masalah teknis. Demikian pula, krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini adalah "*persoalan moral*", "*krisis moral*" secara global. Oleh karena itu, perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. Tidak bisa disangkal lagi bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Menurut Arne Naess (Keraf, 2006), krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah, sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam

alam semesta. Dapat dikatakan bahwa krisis lingkungan global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Etika antroposentrisme merupakan sebuah cara pandang barat, yang bermula dari Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern. Ada tiga kesalahan fundamental dari cara pandang ini. Pertama, manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial (*social animal*), yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Dalam pemahaman ini, manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia di dalam komunitas sosialnya. Kedua, etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Jadi, yang disebut sebagai norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia. Dalam paham ini, hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Etika tidak berlaku bagi makhluk lain diluar manusia. Ketiga, kesalahan cara pandang pada *antroposentrisme* tersebut diperkuat lagi oleh cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang Cartesian dengan ciri utama mekanistik-reduksionistis. Dalam paradigma ilmu pengetahuan yang Cartesian, ada pemisahan yang tegas antara alam sebagai obyek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subyek. Demikian pula, ada pemisahan yang tegas antara fakta dan nilai. Maka paradigma ilmu pengetahuan modern yang mekanistik-reduksionis ini membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penilaian mengenai baik buruk ilmu pengetahuan dan

teknologi beserta segala dampaknya dari segi moral atau agama, adalah penilaian yang tidak relevan. Hal ini melahirkan sikap dan perilaku manipulatif dan eksploitatif terhadap alam, dan pada gilirannya melahirkan berbagai krisis ekologi sekarang ini.

3. Adanya Masalah Dengan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, agar dapat terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah: Perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan "*sistem ekologi dan sosial*" dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya (Sumarwoto, 2006)

Secara implisit, definisi tersebut menurut Hegley, (1992) mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

- a. berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi;
- b. memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;
- c. perlunya campur tangan pemerintah, dukungan dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;
- d. perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara

yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup;

- e. bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen;
- f. mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai Sumber Daya Alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia.

4. Punahnya Kearifan-Kearifan Local (Lokal Genius) Tentang Lingkungan Hidup

Dalam falsafah Jawa, pemimpin yang bijaksana berarti telah "*memayu hayuning bawana*". Ayu-hayu dan rahayu menunjuk mana keselamatan. Memayu berarti membuat selamat. Sedangkan bawana adalah istilah lain untuk buana, dunia, atau jagat. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah wujud nyata "*memayu hayuning bawana*". Polusi air, tanah, dan udara harus dihindari demi masa depan. Kerusakan alam membawa bencana yang amat merugikan. Banjir, tanah longsor, kekeringan banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang kurang memperhatikan kelestarian alam. Seandainya sejak Taman Kanak-Kanak ditanamkan tentang lingkungan hidup maka Indonesia akan tampil sebagai tamansari dunia sesuai dengan konsep Jawa "*memayu hayuning bawana*" (Nasruddin, 2008).

Berdasar pernyataan di atas, maka perlu penggalan falsafah-falsafah dalam masyarakat (*khususnya falsafah Jawa*) yang lebih luas dan dalam. Untuk membangkitkan semangat pemimpin maupun warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena kekayaan alam merupakan titipan generasi yang akan

datang. Pemanfaatannya harus secara arif dan bijaksana.

5. Partisipasi Warga Negara Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup

Ekologi-dalam (*deep-ecology*) adalah cabang dari ekologi yang memandang umat manusia bagian integral dari lingkungannya. Ia merupakan tubuh pemikiran yang menempatkan nilai pada spesies non-manusia, ekosistem dan proses-prosesnya di alam lebih dari sekedar membangun gerakan lingkungan dan gerakan hijau. Ekologi-dalam (*deep ecology*) telah meletakkan sebuah sistem etika lingkungan baru. Prinsip inti *deep ecology* awalnya dikembangkan oleh doktrin egalitarianisme biosfer Arne Naess yang menyatakan bahwa sebagaimana manusia, lingkungan hidup (*the living environment*) adalah sebagai keseluruhan utuh yang memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. (Mudhofir, 2010).

Berdasar pernyataan di atas, maka menyadarkan masyarakat atau warga negara tentang partisipasinya terhadap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena disadari bahwa manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan pada lingkungan hidup pada dasarnya juga merusak pada diri manusia itu sendiri. Prinsip-prinsip *deep ecology* (Arne Naess dalam Mudhofir, 2010) adalah:

- a. Kesejahteraan dan perkembangan manusia dan non-manusia di muka bumi memiliki nilai di dalam dirinya sendiri (seperti nilai intrinsic atau nilai inheren).
- b. Kekayaan dan keragaman bentuk-bentuk kehidupan berkontribusi pada kesadaran nilai-nilai mereka sendiri dan juga nilai-nilai inherennya (dalam dirinya sendiri).
- c. Manusia tidak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan dan keragamannya kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.
- d. Perkembangan hidup dan budaya manusia sepadan dengan pengurangan substansial populasi manusia. Perkembangan kehidupan

non-manusia memerlukan pengurangan semacam ini.

- e. Intervensi manusia modern atas dunia non-manusia terlalu berlebihan, dan kondisi ini makin memburuk.
- f. Karena itu, kebijakan-kebijakan harus berubah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi struktur dasar ekonomi, teknologi, dan juga ideologi. Keadaan yang dihasilkannya akan berbeda dari keadaannya semula.
- g. Perubahan ideologi yang utama adalah penghormatan pada kualitas hidup (yakni berada dalam kondisi-kondisi nilai inheren) bukannya mempertahankan standar hidup yang makin tinggi. Selanjutnya akan muncul kesadaran mendalam terhadap perbedaan antara yang besar dan besar sekali (*the difference between big and great*).
- h. Mereka yang mendukung poin-poin di atas memiliki kewajiban untuk menerapkan perubahan-perubahan mendesak tersebut, langsung maupun tidak langsung.

TEORI ETIKA DAN MORALITAS SERTA TEORI-TEORI ETIKA LINGKUNGAN

1. Pengertian Etika dan moralitas

Secara teoretis, etika mempunyai pengertian: tinjauan etimologis etika berasal dari kata Yunani "*ethos*" (jamaknya: ta etha), yang berarti "*adat istiadat*", yang berarti "*adat istiadat*" atau "*kebiasaan*". Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi kegenerasi lain. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dilakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Moralitas secara etimologis berasal dari kata "*moral*" berasal dari kata Latin "*mos*", yang berarti "*tatacara, adat-istiadat*" atau "*kebiasaan*", sedangkan jamaknya adalah "*mores*". Dalam arti "*adat-istiadat*" atau

“kebijaksanaan”, kata moral mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani **“ethos”**, yang menurunkan kata **“etika”**.

Dalam bahasa Arab kata **“moral”** berarti budi pekerti sama dengan **“akhlak”**, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata **“moral”** dikenal dengan arti **“kesusilaan”** (Daroeso, 1989). Kita dapat memahami moral dengan tiga cara: a). Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. b). Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia didalam lingkungan tertentu. c). Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. (Huky dlm Daroeso, 1989).

2. Beberapa tentang Teori Etika

a) Etika Deontologi

Istilah **“deontology”** berasal dari kata Yunani **“deon”**, yang berarti kewajiban, dan **“logos”** berarti ilmu atau teori. Terhadap pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkrit tertentu, deontologi menjawab: lakukan apa yang menjadi kewajibanmu sebagaimana terungkap dalam norma dan nilai-nilai moral yang ada. Etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Bahkan menurut Kant, kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga. Kemauan baik adalah syarat mutlak untuk bertindak secara moral.

b) Etika Teleologi

Istilah **“teleologi”** berasal dari kata Yunani **“telos”**, yang berarti tujuan, **“logos”** berarti ilmu atau teori. Etika teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan, bagaimana harus

bertindak dalam situasi konkrit tertentu, jawaban **“etika teleology”** adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik.

c) Etika Keutamaan

Berbeda dengan kedua teori etika di atas, etika **keutamaan (virtue ethics)** tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Juga, tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Dikatakan oleh Aristoteles, nilai moral ditentukan dan muncul dari pengalaman hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup ini. Dengan demikian, etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah dan cerita-termasuk dongeng dan wayang.

3. Pengertian Etika Lingkungan

Hampir semua filsuf moral yang berpandangan **“antroposentris”** melihat etika lingkungan hidup sebagai sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Jadi, yang terutama menjadi fokus perhatian etika lingkungan, menurut pengertian ini, bagaimana manusia harus bertindak atau bagaimana perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam tersebut. **Etika lingkungan hidup** lalu memasukkan pula makhluk non-manusia kedalam perhatian moral manusia. Dengan kata lain, kendati bukan pelaku moral (**moral agents**) makhluk bukan manusia pantas menjadi perhatian moral manusia karena mereka dipandang sebagai subyek moral (**moral subjects**).

Etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika Lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi diantara semua kehidupan alam semesta, yaitu

antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk didalamnya, berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam.

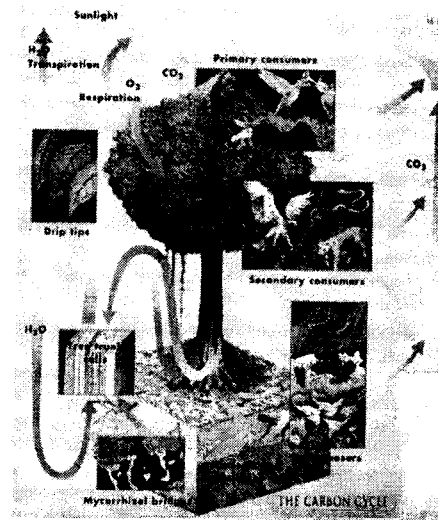
HAKEKAT PEMANASAN GLOBAL DAN DAMPAK LANGSUNG BAGI INDONESIA

Pemanasan Global dapat didefinisikan: kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam. Para ilmuwan telah menghitung bahwa temperatur rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 C-- (1.33 ± 0.32 F) selama seratus tahun terakhir (Abu Fatiah Al-Adnani, 2008). Peneliti senior dari *Center for International Forestry Research* (CIFOR) menjelaskan, pemanasan global adalah kejadian tertangkapnya radiasi gelombang panjang matahari (disebut juga gelombang panas/inframerah) yang dipancarkan bumi oleh gas-gas rumah kaca (efek rumah kaca adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar). Gas-gas ini secara alami terdapat di udara (atmosfer).

Dampak langsung pemanasan global bagi Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Dampak pemanasan global dalam jangka pendek; di Indonesia kurang lebih 70% pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global akan meningkatkan berbagai macam penyakit terhadap manusia, juga akan berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan, karena tumbuhan terganggu. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak negative pada kehidupan di daerah pesisir pantai karena gelombang pasang dan banjir yang sering terjadi, hujan lebat, badai, kekeringan yang silih berganti, sulitnya ketersediaan air bersih, serta penyebaran berbagai penyakit.

2. Beberapa dampak pemanasan global dalam jangka panjang antara lain sebagai berikut: tenggelamnya pulau dan kota, secara perlahan air laut naik kedarat setinggi 1 meter. Kenaikan permukaan air laut berpotensi menenggelamkan 50 meter daratan dari garis pantai kepulauan Indonesia. Rawan kekeringan, kondisi cuaca yang tidak menentu juga dapat mengakibatkan kekeringan walau curuh hujan tinggi. Iklim berubah-ubah, pergeseran musim akibat perubahan iklim dan cuaca yang berubah-ubah telah mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Rawan longsor, ada sekitar 918 lokasi longsor di Indonesia.



Gambar Siklus Biodiversitas dan Efek Rumah Kaca

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Setiap kegiatan atau proyek pembangunan memerlukan lokasi dan lokasi ini dapat merupakan suatu ekosistem atau "*bagian suatu ekosistem*". Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen-komponen ekosistem itu (*lingkungan*). Artinya, dampak proyek pembangunan tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total. Upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan. Untuk mewujudkannya adalah dengan pengelolaan

lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan. Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang konsep ekosistem, asas ekologi atau lingkungan, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perlu diperhatikan bahwa pelestarian lingkungan hidup mengandung dua pengertian, yaitu: 1). Yang dilestarikan adalah fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Suatu lingkungan bisa saja berubah karena adanya pembangunan, tetapi fungsi lingkungan itu tetap dipertahankan. Misalnya: suatu areal yang ditumbuhi pohon-pohonan akan dibangun kawasan industry. Pohon boleh ditebang, tetapi dalam perencanaan harus disediakan areal terbuka dan lokasi untuk tanaman penghijauan. Dalam hal ini, fungsi pohon-pohonan yang ditebang menjelang pembangunan, diganti oleh areal terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan. 2). Yang dilestarikan adalah lingkungan itu sendiri, ansich. Sebagai contoh adalah keberadaan hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam, yang harus tetap dipertahankan (tidak boleh diganggu). Artinya, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan dilingkungan itu karena fungsinya tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

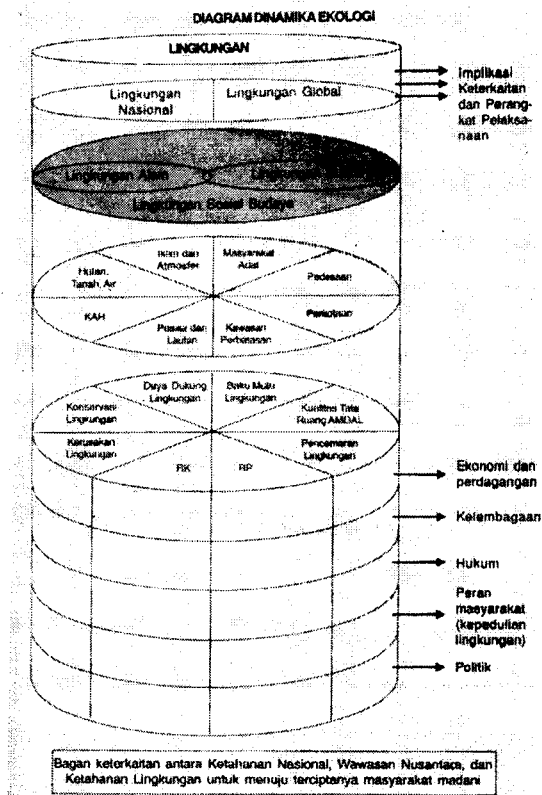
Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting, diperlukan pengelolaan sehingga dampak yang timbul dapat ditoleransi lingkungan. Untuk itu, pemrakarsa wajib melakukan pengelolaan lingkungan pada setiap tahap kegiatannya sesuai dengan jenis dampak yang terjadi.

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Brundtland dlm Imam Supardi, 2003). Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan yang

manusiawi. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati adalah kebutuhan yang paling esensial yang meliputi udara, air dan pangan yang harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk **“dapat hidup sehat”**.

Untuk memenuhi definisi Brundtland tentang pembangunan berkelanjutan, kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati generasi yang akan datang dapat kita usahakan agar terus terpenuhi kepada jenis dan batasnya yang jelas. Sehingga dalam upaya mempertahankan kelestarian lingkungan hidup maka pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) merupakan suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumberdayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan dimasa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Ekosistem dan Pembangunan Konvensional”, dalam ekosistem semua zat, materi dan makhluk saling berkaitan dan saling menghidupi dalam perputaran siklus yang tidak berakhir selagi mata rantai komponen ekosistem tetap utuh. Semakin beranekaragam isi atau sistem, semakin banyak jaringan hubungan antara komponen ekosistem, dan semakin stabil ekosistem berfungsi. Jika komponen dalam ekosistem saling berkaitan, serbaragam, saling mengisi dan serasi lagi selaras, maka perikehidupan ekosistem ini dapat berlanjut. Pada dasarnya pembangunan masyarakat berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang menjamin masa depan suatu masyarakat. Pembangunan ini akan membuat masyarakat yang sehat dan saling memperhatikan, salah satunya adalah kondisi sosial dan lingkungan yang stabil. Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan menekankan potensi kreatifitas dan pikiran manusia dalam menemukan cara untuk mempertemukan tujuan sosial ekonomi masyarakat jangka panjang, dengan hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan biofisik dan permintaan masyarakat.



alam secara komunal (Bruce M, dalam Rachmad K, 2008).

Sistem pengetahuan lokal yang menjadi acuan pada masyarakat tertentu disebut “pamali”, yang digunakan sebagai acuan dalam bertingkah laku; baik tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan-tindakan yang dianggap “tabu”. Bagaimana manusia berintraksi dengan alamnya, binatang, tumbuhan maupun dengan manusia lain telah memiliki persepsi atau sistem pengetahuan lokal sendiri. Manusia juga membangun gagasan-gagasan tertentu yang semata-mata ditujukan sebagai tanggapan terhadap lingkungannya.

Dibutuhkan langkah-langkah konkrit yang sistematis untuk menggali sebanyak-banyaknya kearifan tradisional yang ada dilingkungan kita. Demi menjaga keberlangsungan lingkungan, bukan saatnya lagi mempertentangkan antara pandangan ilmu ilmiah (modern) dengan sistem pengetahuan lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam budaya tentunya juga memiliki keragaman kearifan ekologis. Penghormatan dan pemanfaatan kearifan-kearifan ekologis yang terkandung dalam sistem pengetahuan lokal menjadi kebutuhan mutlak bagi semua pihak, untuk merancang keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam falsafah Jawa bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan tersirat dalam pesan “*Hamemayu Hayuning Bawono*” yang sampai sekarang masih menjadi “*living philosophy*” dikalangan masyarakat. Di dalam filosofi “*Hamemayu Hayuning Bawono*” itu terkandung di dalamnya kewajiban “*Tri Satya Brata*”. Pertama, rahayuning bawono kapurbo waskitaning manungso (kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa), yang menunjuk pada harmoni hubungan antara manusia dengan alam, baik dalam lingkup dunia sebagai kewajiban “*Hamengku Bumi*”, maupun lingkup yang lebih luas dalam seluruh alam semesta (universe), sebagai kewajiban “*Hamengku Buwono*”. Kedua, darmaning manungso mahanani rahayuning negoro (tugas hidup manusia adalah mejaga keselamatan

MELEMBAGAKAN KEMBALI KEARIFAN-KEARIFAN LOKAL TRADISIONAL

Kearifan-kearifan lokal tradisional tidak terdapat di masyarakat perkotaan yang telah mengalami modernisasi atau industrialisasi. Sistem pengetahuan lokal terdapat dalam masyarakat lokal dengan karakteristik-karakteristik antara lain:

1. keturunan penduduk asli suatu daerah yang kemudian dihuni oleh kelompok masyarakat dari luar yang lebih kuat.
2. sekelompok orang yang mempunyai bahasa, tradisi, budaya, dan agama yang berbeda dengan kelompok yang dominan.
3. selalu diasosiasikan dengan beberapa tipe kondisi ekonomi masyarakat;
4. keturunan masyarakat pemburu, nomadik dan ladang berpindah;
5. masyarakat dengan hubungan sosial yang selalu menekankan pada kelompok, pengambilan kesepakatan melalui kesepakatan dan pengelolaan sumber daya

Negara), sebagai kewajiban manusia selama hidup di dunia, dimana kehidupan merupakan dinamika manusia, yaitu *“Hamengku Negoro”*. Ketiga, rahayuning manungso dumadi karono kamanungsane (keselamatan manusia oleh kemanusiaannya sendiri). (Sri Sultan HB X dalam Nasruddin A, 2008).

PENUTUP

Pendidikan Lingkungan Hidup hendaknya dikembangkan berdasarkan konsep dasar tentang lingkungan hidup yang diterapkan dalam keseluruhan jenis dan jalur pendidikan ilmu pengetahuan SD sampai PT. Pendidikan tidak hanya berupa formal tetapi juga non formal dan in-formal melalui kelembagaan resmi pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat. Pendidikan lingkungan harus mampu mendorong terjadinya integrasi kearifan sikap dan perilaku dalam menghadapi masalah yang timbul karena tatanan alam.

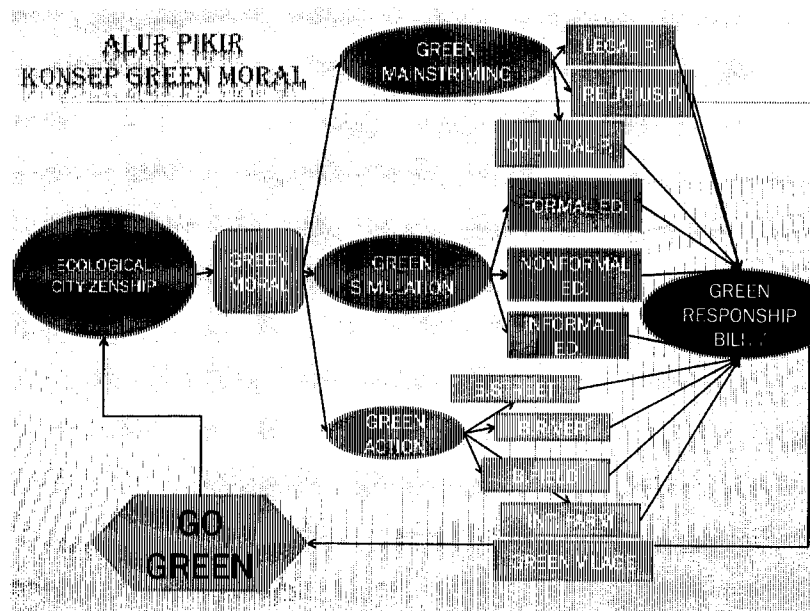
Pengelolaan lingkungan dilaksanakan melalui pendidikan lingkungan yang misinya adalah pendidikan kearifan sikap, moral maupun spiritual dalam realitas perilaku kehidupan saat ini dan masa depan bagi keselamatan dan kesejahteraan ekosistem dimana kita berada.

Untuk mewujudkan partisipasi warga negara dalam menjaga lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan perlu pengenalan konsep *“Green Moral”* dalam pengejawantahannya melalui:

1. *Green Mainstreaming dengan pendekatan: 1) Legal Approach, 2). Culture Approach, 3). Religion Approach.*
2. *Green Simulation Game*
3. *Green Action: 1) Green Street/Botanical Street, 2). Green River/Botanical River, 3). Green Field/Green Area*

Dalam konsep *“Green Moral”* disini bagaimana kita membiasakan pada warga negara untuk bersikap dan berperilaku yang baik terhadap lingkungan, bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang maupun dengan manusia itu sendiri. Untuk mendukung konsep ini maka perlu adanya *“Green Mainstreaming”* /pengarusutamaan, Makna semua komponen bangsa harus fokus pada “permasalahan lingkungan” baik itu warga negaranya, penyelenggara negara maupun lembaga negara. Hal ini bisa diperkuat dengan adanya legal approach, perlu didukung peraturan perundang-undangan yang responsip lingkungan, disemua lini pembuat undang-undang. Disisi lain perlu adanya penggalian nilai-nilai budaya local, *“local genius”* kita untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup kita. Pendekatan dengan nilai-nilai agama juga perlu diangkat, tidak satu agamapun yang mengajarkan untuk merusak lingkungan, semua agama mengajarkan tentang keselamatan lingkungan.

Sikap perilaku manusia terbentuk karena kebiasaan, untuk membiasakan perilaku itu salah satunya dengan *“Simulation Game”*, untuk itu dalam rangka membentuk perilaku yang baik terhadap lingkungan hidup, warga Negara perlu dilatih dengan *“Green Simulation Game”* yang materinya adalah pengenalan terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup, sampai pada bagaimana kita mencegah atau meminimalisir kerusakan pada lingkungan hidup. Selanjutnya Warga Negara melakukan *“Green Action”*, dalam falsafah Jawa bagaimana kita bisa memunculkan perasaan kepada warga Negara; merasa *“handarbeni-hangrungkepi”* (memiliki dan mengamankan).



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mudhofar, 2010, Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Argumentasi Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah), Dian Rakyat, Jakarta.

Al-Adnani, Abu Fatiah, 2008, Global Warming (Sebuah isyarat dekatnya akhir Zaman dan kehancuran dunia), Granada Mediatama, Jakarta.

Anshoriy, Nasruddin dan Sudarsono, 2008, Kearifan Lingkungan (dalam perspektif budaya jawa), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Arif, Ahmad dan Permanasari, Indira 2009, Hidup, Hirau, Hijau (Langkah menuju hidup ramah lingkungan), Gramedia, Jakarta.

Canton, James, 2010, The Extreme Future, Pustaka Alvabet, Jakarta.

Chang, William, 2009, Bioetika Sebuah Pengantar, Kanisius, Yogyakarta.

Daniel, Valerina, 2009, Easy Green Living, PT. Mizan Publika, Jakarta.

Danusaputro, Munadjat, 1984, Hukum Lingkungan dan Pembangunan, Binacipta, Jakarta

Daroeso, Bambang, 1989, Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila, Aneka Ilmu, Semarang.

Djamal, Irwan, Zoeraini, 2005, Tantangan Lingkungan dan Landsekap Hutan Kota, Bumi Aksara, Jakarta.

Djamal, Irwan, Zoeraini, 2010, Prinsip-Prinsip Ekologi (Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya, Bumi Aksara, Jakarta.

Elmubarok, Zaim, 2008, Membumikan Pendidikan Nilai, Afabeta, Bandung.

Fuji Raharjo, Imam dan Jawama Adam, Sugayo, 2007, Dialog Hutan Jawa, Mengurai makna Filosofis PHBM, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fadeli, Chafid dan Nur Utami, 2008, Audit Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hariyadi dan B. Setiawan, 2010, Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku (Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Iskandar, Johan, 2001, Manusia Budaya dan Lingkungan Ekologi Manusia, Humaniora Utama Press, Bandung.

Iskandar, Johan, 1992, Ekologi Perladangan di Indonesia (Studi Kasus: dari daerah Baduy Banten Selatan, Jabar), Djambatan, Jakarta.

Jurnal Lingkungan Hidup, (Tahun I-No.1/1994), Jakarta, ICEL K. Dwi Susilo, Rachmad, 2008. Sosiologi Lingkungan, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Kaswari, EM.K, 1993, Pendidikan nilai memasuki tahun 2000, Grasindo, Jakarta.
- Khaelany, 1996, Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Rineksa Cipta, Jakarta.
- Keraf, A. Sonny, 2006 Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Leimona, Beria dan Fauzi, Aunul, 2008, CSR dan Pelestarian Lingkungan, Mengelola Dampak: Positif dan Negatif, Indonesia Business Links, Jakarta.
- Mulyana, Rohmat, 2004, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Alfabeta, Bandung.
- Neolaka, Amos, 2008, Kesadaran Lingkungan, Rineksa Cipta, Jakarta.
- Sastrawijaya, Tresna. A, 2009, Pencemaran Lingkungan, Rineksa Cipta, Jakarta.
- Silalahi, M. Daud, 2001 Hukum Lingkungan (dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia), Alumni, Bandung.
- Slamet, Y, 1994, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, UNS Press, Surakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2008, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta.
- Soerjani, Mohamad, 2009. Pendidikan Lingkungan (Environmental Education), UI-Press, Jakarta.
- Sontang Manik, Karden Eddy, 2009, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Djambatan, Jakarta.
- Sugandhy, Aca, dan Hakim, Rustam, 2007 Prinsip dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supardi, Imam, 2003, Lingkungan Hidup dan Pelestariannya, Alumni, Bandung.
- Suparmi, Niniek, 1994, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ward, Barbara dan Dubos, Rene 1980, Hanya Satu Bumi, terjemahan S. Supomo, Lembaga Ekologi UNPAD dan Yayasan Obor, Bandung.